

## **STUDI BUDAYA POLITIK MAHASISWA MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN POLITIK KEWARGANEGARAAN**

**Shofia Nurun Alanur<sup>1</sup>, Sunarto Amus<sup>2</sup>, Jamaludin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi PPKn, FKIP Universitas Tadulako

Email : [shofianurun@gmail.com](mailto:shofianurun@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Kehidupan politik senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan negara. Politik sebagai cara untuk mengupayakan terwujudnya tujuan dan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa sebagai agent of change harus memiliki budaya politik yang aktif berpartisipasi untuk dalam politik untuk tujuan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan budaya politik mahasiswa yang ditinjau dari pengetahuan politik, kesadaran politik dan partisipasi politik melalui mata kuliah pendidikan politik kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik angket terhadap 30 orang mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan universitas tadulako. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, mahasiswa menunjukkan budaya politik partisipan yang dilihat dari indikator pengetahuan wajib menggunakan hak pilih dalam pemilu, alasan memilih dengan pertimbangan rekam jejak calon, kemauan mengajak orang lain menggunakan hak pilih serta penolakan terhadap politik uang dan kampanye hitam. Hasil analisis terhadap aspek pengetahuan, kesadaran dan partisipasi politik yang membentuk budaya politik partisipan mahasiswa, sejalan dengan aspek dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic participation*.

### **ABSTRACT**

*Political life is always related to society and the state. Politics as a way to seek the realization of the goals and needs of society. Students as agents of change must have a political culture that actively participates in politics for the purpose of nation and state. This study aims to analyze and describe the political culture of students in terms of political knowledge, political awareness and political participation through civic political education courses. This research is a descriptive qualitative research. Data were collected using a questionnaire technique on 30 students of Pancasila education and citizenship at Tadulako University. Data analysis uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. From the results of the study, students showed the political culture of the participants as seen from the indicators of knowledge of mandatory voting rights in elections, reasons for choosing based on candidate's track record, willingness to invite others to use their right to vote and rejection of money politics and black campaigns. The results of the analysis of aspects of knowledge, awareness and political participation that shape the political culture of student participants, are in line with aspects of civic education, namely civic knowledge, civic skills, and civic participation.*

### **Kata kunci:**

Budaya Politik; Mahasiswa;  
Pendidikan Politik; Pendidikan  
Kewarganegaraan

### **Keywords:**

*Political Culture; College student;  
Political Education; Civic  
education*

## **Pendahuluan**

Politik adalah bagian dari adanya demokrasi. Politik dimaknai sebagai aktivitas masyarakat dalam suatu bangsa dengan tujuan membuat, mempertahankan, serta memperbaiki peraturan sebagai alat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. dengan tidak terlepas atas peristiwa konflik dan kerja sama. Negara Indonesia mengenal budaya politik pada masyarakat. Budaya politik berkaitan dengan seluruh pengetahuan, emosional, bahkan penilaian etika moril langsung yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Budaya politik juga berkaitan dengan orientasi politik dan sikap warga negara dalam sistem politik, serta sebuah sikap dari warga negara terhadap sistem tersebut, dengan kata lain budaya politik yang berlaku di sejumlah negara memiliki konsekuensi yang signifikan untuk dukungan publik (Robi Ulzikri et al., 2021). Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Khoirul Saleh & Achmat Munif, 2015). Politik bukanlah sesuatu yang tabu untuk dipelajari atau hanya kalangan pejabat yang harus tahu tentang politik. Mahasiswa sebagai pemilih pemula harus memiliki pengetahuan dan sikap politik. Hal ini dapat dilihat dari budaya politik yang dimiliki oleh mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, penting untuk terlibat dalam politik dan mencerminkan budaya politik, untuk berkembangnya dan majunya negara Indonesia, dalam demokrasi pemerintahan.

Berdasarkan tipenya, budaya politik terbagi menjadi tiga bagian yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula dan budaya politik partisipan. Pada budaya politik parokial, masyarakat cenderung tidak memiliki ketertarikan terhadap politik. Budaya politik parokial (parochial political culture) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik semacam ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik (Syuhada, 2020).

Budaya politik Kaula, yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Sedangkan perhatian (yang frekuensinya sangat rendah) atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik dapat dikatakan rendah atau tidak ada. Masyarakat dengan budaya politik kaula menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya (Kantaprawira, 2019). Budaya politik kaula sangat berbahaya, karena akan melahirkan generasi dengan karakter yang tidak percaya diri dan hanya mengandalkan orang lain. Budaya politik yang paling diharapkan dimiliki pada masyarakat khususnya mahasiswa adalah budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil (Suryana, 2020). Budaya politik partisipan mengemukakan bahwa ada keterlibatan aktif baik secara pengetahuan maupun tingkat partisipasi dari warga negara.

Budaya partisipan ini dapat dilakukan misalnya, terlibat dalam kegiatan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Melalui BEM, mahasiswa dapat memberikan masukan, usul, saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan mahasiswa di kampus. Dapat juga melalui kegiatan

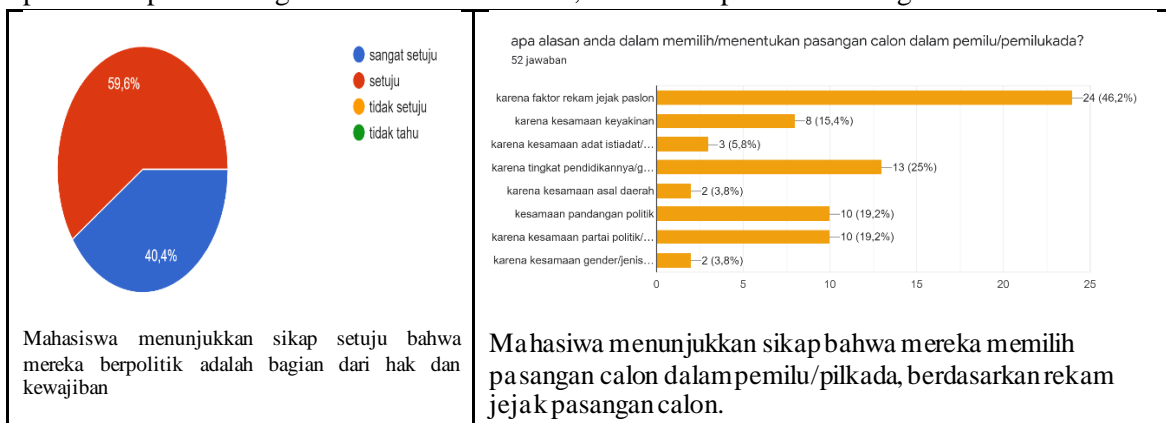
akadmeik seperti lomba debat konstitusi, debat kepemiluan, debat hukum, debat bahasa indonesia dan bahasa inggris. Dalam lingkungan masyarakat, mahasiswa atau generasi muda dapat ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, remaja masjid, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dalam lingkungan pemerintahan Negara, dapat menerapkan budaya politik partisipan melalui pengalaman-pengalaman politik dalam kegiatan-kegiatan politik negara, misalnya menjadi anggota atau simpatisan partai politik, menyaksikan atau mengikuti debat politik antar elite politik melalui berbagai media, mengikuti kampanye pemilihan umum, memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD, DPR RI, dan presiden. Oleh karena itu, penulis meneliti bagaimana budaya politik mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap politik, apalagi menjelang pemilu 2024. Penulis melakukan penelitian melalui mata kuliah pendidikan politik kewarganegaraan.

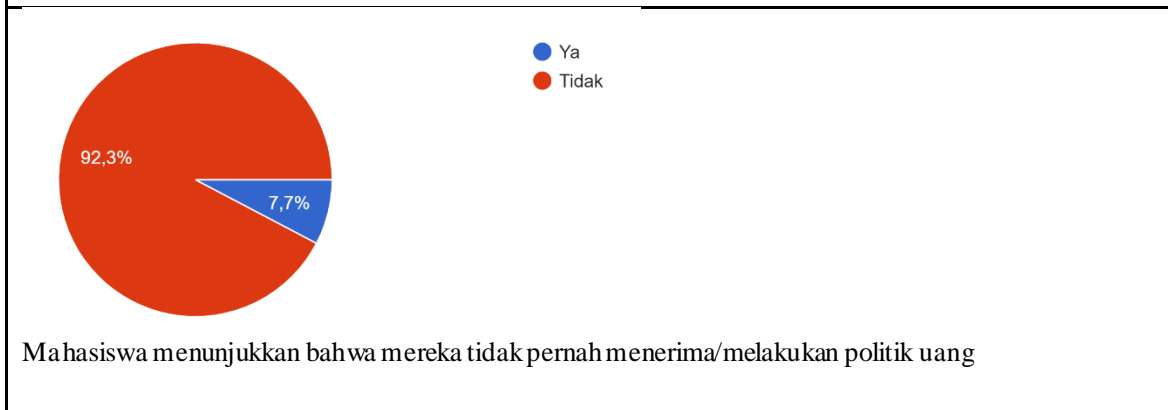
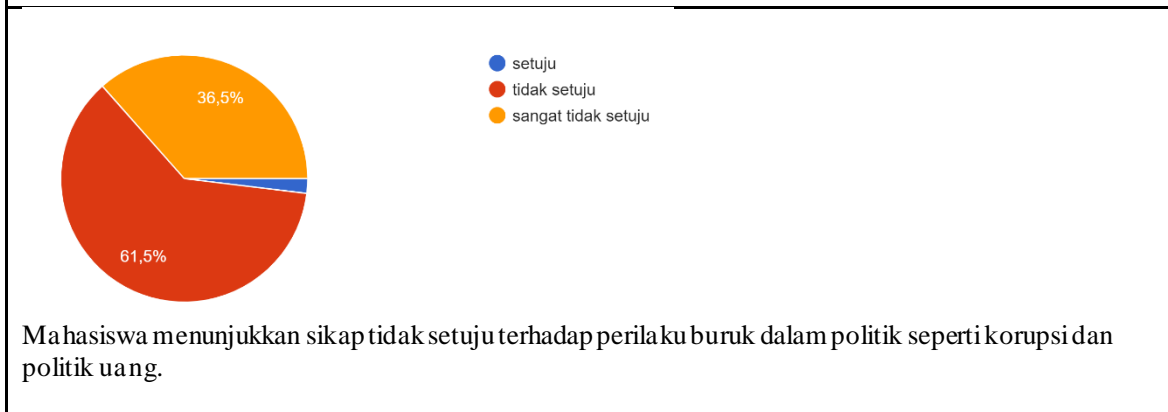
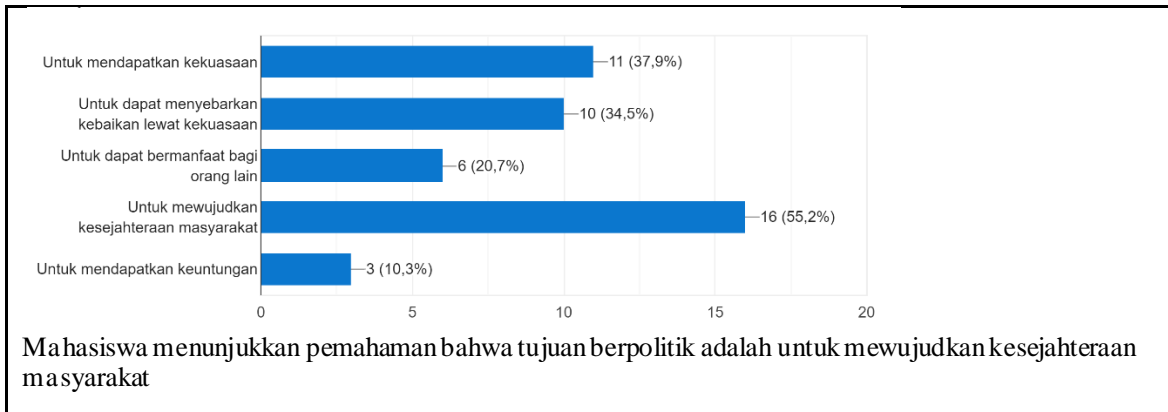
## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik angket melalui google form dan menggunakan studi literatur. Teknik angket dilakukan terhadap 30 orang mahasiswa yang memprogram mata kuliah pendidikan politik kewarganegaraan di program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan FKIP universitas tadulako. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap politik untuk menganalisis budaya politik yang didominasi oleh mahasiswa

## Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada indikator sebagai berikut. Pertama, Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap kepentingan bangsa dan negara, pengetahuan tentang kewajiban ikut serta dalam politik, pengetahuan tentang alasan dalam memilih pasangan calon dan mengetahui rekam jejak pasangan calon, pemahaman tentang perilaku buruk dalam politik, pemahaman tentang tujuan berpolitik, partisipasi dalam politik (pemilu), pandangan tentang perbuatan politik uang. Dari indikator tersebut, maka hasil penelitian sebagai berikut.





## PEMBAHASAN

Budaya politik partisipan terbentuk melalui pengetahuan, kesadaran dan partisipasi politik warga negara. Pengetahuan politik merupakan konsep utama dalam perilaku politik. Pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang yang didapatkan melalui sosialisasi politik yang pernah didupatkannya. Pengetahuan politik salah satunya dengan memberikan pendidikan politik yang dilakukan dengan cara sosialisasi politik oleh lembaga, partai, ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat (Agus et al., 2020). Pengetahuan politik mahasiswa program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan didapatkan melalui mata kuliah pendidikan politik kewarganegaraan. Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa diberikan materi tentang urgensi pendidikan politik, hakikat pendidikan politik, teori politik, suprastruktur pendidikan politik bagi pembentukan warga negara yang cerdas dan baik dan model-model pendidikan politik di persekolahan dan masyarakat bagi pencerdasan warga negara.

Urgensi pendidikan politik itu didasarkan pada asumsi kedaulatan rakyat yang berpaham bahwa pemerintahan yang adil adalah, siapa yang memperoleh kekuasaan, dia itulah yang bertanggung jawab. Sebaliknya jika rakyat mendapat kekuasaan menurut dasar kedaulatan rakyat, maka rakyat pulalah yang bertanggung jawab. Artinya, jika rakyat tak memiliki kesadaran politik, maka rasa tanggung jawabnya akan amat kurang (Askar Nur, 2013). Pendidikan politik di sekolah melalui pembelajaran PKn adalah mengajarkan manusia untuk mampu mengembangkan bakat dan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang ada dalam setiap individu supaya bisa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik dan menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn (citizenship education) dan pendidikan politik kewarganegaraan dilaksanakan untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk semua jalur dan jenjang pendidikan termasuk kecerdasan politik yang ditumbuhkembangkan sebagai bagian persiapan untuk melaksanakan kegiatan politik di kemudian harinya (Mulyadi & Anyan, 2019). Hakikat pendidikan politik juga sejalan dengan tujuan nasional pendidikan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dalam pendidikan politik itulah ditransfer pengetahuan tentang politik kepada mahasiswa sehingga dapat muncul kesadaran politik. Kesadaran politik dapat ditinjau dari, pertama, aspek kognitif yang terdiri dari pemahaman akan peran lembaga politik, pengetahuan atas hak dan kewajiban sebagai warga negara, ketertarikan dan keterpaparan politik. Kedua, aspek afektif yang terdiri dari sikap saat mendapatkan hak dan kewajiban warga negara, loyalitas pada negara, keterkaitan budaya dan identitas pada sikap politik. Ketiga, aspek psikomotor yang terdiri dari kemampuan menjalankan hak dan kewajiban warga negara, kemampuan mengatasi perubahan situasi terkait politik, dan kemampuan mengatasi isu/masalah persatuan bangsa (Arom & Yuhan, 2021). Sedangkan kesadaran politik memunculkan partisipasi politik yang aktif. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Nur Wardhani, 2018). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sudah pernah menggunakan hak politiknya untuk ikut serta memilih dalam pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan menganalisis teori-teori, maka mahasiswa dapat dinilai memiliki pengetahuan politik yang baik. Mereka memahami bahwa berpolitik adalah hak dan kewajiban warga negara. Mereka juga menyadari bahwa tujuan berpolitik bukan untuk memenuhi keuntungan diri sendiri melainkan untuk kemashlahatan masyarakat. Kesadaran ini berdampak pada sikap tidak setuju terhadap perilaku buruk dalam politik seperti politik uang. Memahami bahwa perbuatan politik uang merupakan sikap negatif dalam berpolitik merupakan bagian dari pengetahuan politik atau dalam istilah kewarganegaraan adalah *civic knowledge*. Sedangkan sikap mahasiswa yang menolak politik uang adalah bagian dari kesadaran politik. Sikap mahasiswa yang memilih pasangan calon dalam pemilu/pemilukada berdasarkan rekam jejak pasangan calon, merupakan bagian dari pengetahuan politik. Mahasiswa memahami, merupakan sikap yang bijak, jujur, objektif, ketika memilih berdasarkan prestasi, bukan karena pertalian saudara, atau hal lainnya. Hal ini juga menunjukkan bagian dari *civic skill*. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam menentukan sikap atau berpikir kritis.

Berdasarkan pengetahuan dan kesadaran politik, melahirkan budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan biasanya ada pada kondisi masyarakat di mana setiap individunya telah mampu melibatkan dirinya dalam aktivitas kehidupan politik, misalnya ikut memilih saat pemilu. Budaya politik ini memiliki ciri orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang terbilang baik dan masyarakat telah mampu berperan secara aktif, sebagai akibat munculnya sikap saling percaya di

antaranya warga negaranya, sehingga kehidupan demokrasi berkembang dengan baik (Robi Ulzikri et al., 2021). Teori ini sesuai dengan hasil penelitian terhadap mahasiswa dan hasil ulasan teori di atas, bahwa mahasiswa menunjukkan kesadaran politik dari aspek kognitifnya (pengetahuan politik, *civic knowlegde*), kesadaran politik (*civic skill*) dan partisipasi politiknya (*civic paticipation*).

Mahasiswa yang memiliki budaya politik partisipan, memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Mereka merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya, sehingga budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Pernyataan ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan, bahwa dalam *civic education* bertugas membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan peranan, tugas, hak, dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara (Widodo, 2018). Menurut Maftuh dan Sapriya (2005), juga menyampaikan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*) yakni yang cerdas (*civic inteliegence*) dan tanggung jawab (*civics responsibility*).

## Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan universitas tadulako yang mengikuti perkuliahan pendidikan politik kewarganegaraan, menunjukkan budaya politik partisipan. Hal ini tercermin dan terbentuk dari adanya pengetahuan politik yang selaras dengan *civic knowledge*, adanya kesadaran politik yang selaras dengan *civic skill* dan adanya partisipasi politik yang sejalan dengan *civic disposition*. Budaya politik yang ditunjukkan berupa mengikuti perhelatan pemilu dan pilkada dan menolak politik uang serta mengkampanyekan larangan politik uang dan kampanye hitam. Budaya politik partisipan sangat diharapkan ada dalam diri setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Karena dalam *civic education*, pendidikan kewarganegaraan melakukan persiapan warga negara muda untuk berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif mengajarkan warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dan diharapkan mengalami perubahan kearah positif dalam lingkungan mereka untuk mengembangkan komitmen yang abadi untuk partisipasi di masyarakat (Sutiyono, 2018).

## Referensi

- Agus, A. A., Badaruddin, S., Muhkam, M. F., & Umalia, A. D. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019-2024 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 15(2). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i2.19679>
- Arom, N. F., & Yuhan, R. J. (2021). PENYUSUNAN INDEKS KESADARAN POLITIK DI KALANGAN MAHASISWA. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.639>
- Askar Nur. (2013). Urgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologipolitik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Kantaprawira, R. (2019). Sistem Politik Indonesia. In *Bandung: Sinar Baru Algesindo* (Issue 1).
- Khoirul Saleh, & Achmat Munif. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *Addin*, 9(2), 309–332.

- Mulyadi, Y. B., & Anyan, A. (2019). Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.21067/jip.v9i1.2904>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Robi Ulzikri, A., Cahyadi Kurniawan, R., & Indrajat, H. (2021). Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.108>
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1).
- Sutiyono, S. (2018). REFORMULASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGUATKAN NASIONALISME WARGA NEGARA MUDA DI WILAYAH PERBATASAN. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.1824>
- Syuhada, O. (2020). FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DAN PERWUJUDANDEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *Journal Presumption of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.336>
- Widodo, B. (2018). Membangun Kedewasaan Berpolitik Warga Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 70–78. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp70-78>